

Intervensi Rusia ke Suriah Tahun 2011-2016

Yudhi Indrajati.¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstrak

Suriah adalah salah satu negara yang terletak di Timur Tengah. Kondisi negara ini cukup stabil karena dipimpin oleh keluarga Assad yang otoriter. Pada tahun 2011 terjadi revolusi Arab di Timur Tengah. Revolusi ini dimulai dari negara Tunisia, lalu terjadi di Mesir dan menyebar ke seluruh wilayah di Timur Tengah. Suriah akhirnya juga terkena dampak revolusi Arab ini. Revolusi yang terjadi di Suriah cukup tragis karena memakan korban jiwa dalam jumlah besar dan berlangsung lama. Rusia sebagai negara adikuasa ikut campur dalam masalah konflik di Suriah. Rusia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan oposisi dan mempertahankan pemerintah Bashar Al Assad di Suriah. Tujuan Rusia berada di Suriah adalah untuk kepentingan nasionalnya menunjukkan kehebatan senjata produksinya dan untuk kerjasama keamanan dalam mempertahankan sekutunya di Timur Tengah.

Syria is one of state wich is located in Middle East. This state condition is stable enough because it is led by authoritarian Assad family. The Arab Spring erupted in 2011, it started from Tunisia, Egypt, and spreaded into almost all state in the Middle East. Finally Syria had to undergo such revolution. It was too tragic because it killed millions of its people. Russia as a super power intervened intens conflict in Syria. Russia use all his military strength for attacking the opposition and maintaining the Bashar Al Assad's government. Russia had a purpose in Syria, to get his national interest showed his military ams product, and defended its security cooperation in maintaining its ally in the Middle East.

Key words: *Fyria, Arab Spring, Conflict, Russia*

Pendahuluan

Sebelum tahun 1918, istilah Suriah, atau juga dikenal dengan nama Syam, mencakup seluruh daerah yang sekarang ini mencakup negara-negara Suriah, Yordania, Palestina, Israel dan Libanon. Pada mulanya, baik bagi orang Romawi maupun bagi orang Ustmani, daerah Suriah itu terbentang dari Laut Tengah sampai ke sungai Furat, mulai dari Sinai sampai ke daerah

perbukitan di selatan Turki. Daerah itu, terutama bagi para pendukungnya, dikenal dengan nama Suriah Raya. Akan tetapi negara Suriah yang kita perkatakan sekarang ini, memiliki daerah yang lebih kecil daripada itu. (Sihbudi dkk, 1995)

Suriah atau dalam bahasa Inggrisnya Syria, atau yang nama resminya Republik Arab Suriah, berbatasan di sebelah utara dengan Turki, di sebelah timur berbatasan dengan Irak, di sebelah

¹ Alamat: Kampus IISIP Jakarta Jl.Raya Lenteng Agung No.32 Jakarta Selatan 12610. Tel. 021-7806223, 7806224. Fax.021-7817630

selatan dengan Yordania, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Israel, Lebanon dan Laut Tengah. Meskipun bagian-bagian barat dan selatan negara itu adalah daerah yang berpegunungan, namun pada umumnya Suriah terdiri dari padang pasir, yang apabila mendapat pengairan yang cukup akan dapat diubah menjadi daerah pertanian. Ibu kotanya Damaskus adalah salah satu kota tertua terus dihuni di dunia.

Penduduk Suriah terdiri dari berbagai etnis dan agama (muslimedianews.com). Keseluruhan penduduknya berjumlah sekitar 22.500.000 jiwa. Muslim Sunni di Suriah merupakan mayoritas. Jumlah mereka sekitar lebih dari 70% atau sekitar 16,2 juta/ 16.200.000 jiwa, terdiri dari:

1. Sekitar 59-60% atau 13.500.000 jiwa adalah Sunni etnis Arab
2. Sekitar 9% atau 2.025.000 adalah Sunni etnis Kurdi
3. Sekitar 3% atau 675.000 adalah Sunni etnis Turkomen

Syiah di Suriah hanya sekitar 13% atau 2,9 juta (2.925.000 jiwa) yang terdiri dari berbagai aliran Syiah, antara lain Alawit, Syiah Itsna Asyariyah, Ismailiyah dan lainnya. Kristen sekitar 10% atau 2.250.000 jiwa, dimana mayoritas adalah Antiokhia Ortodoks, sisanya termasuk Katolik Yunani Assyria Gereja Timur, Armenia Ortodoks, Protestan dan lainnya. Dan terakhir adalah Druze sekitar 3% atau 500.000 jiwa yang berkonsentrasi terutama di daerah selatan Jabal al Druze.

Negara Suriah modern didirikan setelah Perang Dunia I sebagai mandat Perancis. April tahun 1946, Suriah merdeka sebagai sebuah negara Republik Parlemen. Pasca kemerdekaan itu, Suriah mengalami kekacauan yang sebagian besar disebabkan oleh upaya kudeta, pada periode 1949-1971. Suriah juga pernah terlibat dalam Perang Arab Israel pada tahun 1948, bersama negara-negara Arab lainnya berusaha untuk mencegah pembentukan negara Israel.

November 1956, sebagai akibat langsung dari Krisis Suez, Suriah menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet sehingga terjadi pertukaran untuk peralatan militer. Meningkatnya kekuatan militer Suriah membuat Turki waspada.

Antara 1958 dan 1961, Suriah bersatu sementara dengan Mesir (*United Arab Republic*) yang diakhiri dengan kudeta militer. Suriah berada dibawah Undang-Undang Darurat 1963-2011. Tahun 1967, Suriah perang melawan Israel. Tahun 1973, Suriah dan Mesir memprakarsai Perang Yom Kippur melawan Israel.

Bashar Al Assad menjadi presiden sejak tahun 2000 dan didahului oleh ayahnya yang bernama Hafiz Al Assad tahun 1970-2000. Pada tanggal 5 Oktober 2003, Israel membom sebuah tempat di dekat Damaskus, dan mengklaim itu adalah fasilitas pelatihan teroris bagi anggota Jihad Islam. Pada bulan Maret 2004, etnis Kurdi Suriah dan Arab bentrok di timur laut kota Al Qamishil. Pada tahun 2005 Suriah mengakhiri pendudukannya atas Lebanon.

Pada tahun 2011 terjadi revolusi di negara Suriah. Ini merupakan dampak dari revolusi di Tunisia yang menyebar ke berbagai negara di Timur Tengah (Agastya 2013). Akibat dari revolusi ini, banyak penguasa di negara-negara Arab tumbang, selain itu korban berjatuhannya cukup banyak baik dari pihak militer maupun dari pihak sipil. Berikut ini adalah negara-negara yang terkena Revolusi Arab: (academia.edu)

Tunisia

Akibat peristiwa pembakaran diri Mohammed Bouzizi sebagai bentuk protes kepada kekuasaan Presiden Tunisia Zine Al Abidine Ben Ali menjadi pemicu aksi demonstrasi besar-besaran pada bulan Desember 2010 dan berakhir pada bulan Januari 2011 dengan perginya Ben Ali ke Arab Saudi untuk mencari suaka politik, peristiwa ini menandai berakhirnya 23 tahun kekuasaan diktator Ben Ali. Peristiwa revolusi besar-besaran di Tunisia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu harga pangan yang tinggi, pembatasan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan berpolitik, inflasi tinggi, kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kemiskinan. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Tunisia memakan korban dalam jumlah yang besar baik luka-luka maupun meninggal dunia akibat mendapat perlawanan fisik dari pasukan polisi dan tentara pemerintah. Kemudian Perdana

Menteri Tunisia yaitu Muhammad Ghannouchi mengundurkan diri pada tanggal 27 Februari atas desakan masyarakat Tunisia. Pada bulan Oktober diadakan pemilu demokrasi pertama kalinya di negara tersebut untuk memilih 217 anggota Dewan Parlemen untuk menyusun konstitusi baru. Beji Caid El Sebsi menjadi Perdana Menteri Tunisia.

Terinspirasi oleh revolusi di Tunisia, masyarakat Mesir memulai revolusi pada tanggal 25 Januari 2011 dan berlangsung selama 18 hari. Pada tanggal 28, pemerintahan Mesir berhasil memutus jaringan internet di negaranya dalam rangka mencegah terjadinya penggalangan massa besar-besaran dalam situs jejaring sosial Facebook. Beberapa hari berikutnya sebanyak sepuluh ribu warga turun ke jalan sebagai aksi protes, Presiden Husni Mubarak membubarkan pemerintahannya dan membentuk kabinet baru. Presiden Husni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun. Pada tanggal 10 Februari Presiden Mubarak memberikan wewenang kepresidenannya kepada Wakil Presiden Umar Sulaeman. Tetapi, Mubarak tetap menegaskan bahwa dia masih menjabat sebagai Presiden hingga masa jabatannya berakhir. Aksi protes berlangsung keesokan harinya dan Sulaeman dengan cepat mengumumkan bahwa Husni Mubarak telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Mesir, serta memberikan kekuasaannya kepada Pasukan Tentara Mesir. Militer Mesir segera membubarkan Parlemen dan membekukan konstitusi Mesir. Seorang warga sipil Essam Sharaf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Aksi protes masih terus berlangsung hingga akhir tahun 2011 dikarenakan kekhawatiran masyarakat terhadap pembentukan Dewan Tinggi Militer. Muhammad Mursi dilantik menjadi Presiden Mesir melalui pemilu yang demokratis. Akan tetapi Mursi akhirnya dikudeta kembali oleh pihak militer Mesir dengan alasan kurang baik dalam memerintah negara piramida ini.

Aksi anti pemerintahan Muamar Kadhafi dimulai pada tanggal 15 Februari 2011. Tanggal 18 Februari pasukan oposisi menguasai kota Benghazi, kota kedua terbesar di Libya

setelah Tripoli. Pemerintahan Kadhafi menurunkan pasukan khusus dan tentara bayaran untuk merebut kembali kota Benghazi namun berhasil dipaksa mundur oleh pasukan oposisi. Pada tanggal 20 aksi protes menyebar di kota Tripoli pasca ancaman adanya perang saudara yang diutarakan oleh Saif Islam Kadhafi melalui jaringan televisi pemerintah. Dan perang saudara terjadi memakan ribuan korban serta mendapat tekanan dari dunia internasional salah satunya dengan pengusiran para diplomat Libya. Selama perang saudara terjadi, pasukan oposisi menciptakan pemerintahan sementara untuk melawan pemerintahan Kadhafi. Pada tanggal 17 Maret, Resolusi Dewan Keamanan PBB membuat keputusan adanya zona larangan terbang bagi pasukan udara Libya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga sipil di Libya. Dua hari kemudian pasukan Perancis, Amerika dan Inggris mengintervensi negara Libya dengan membombardir wilayah yang dikuasai pasukan pemerintahan Kadhafi diikuti oleh koalisi pasukan militer dari 27 negara di Timur Tengah dan Eropa. Pada akhir Agustus pasukan oposisi berhasil merebut Tripoli sebagai titik akhir dalam merebut dan mengakhiri 42 tahun kekuasaan Kadhafi. Muamar Kadhafi bersama dengan para pejabat pemerintahannya berkumpul di kota Sirte dan menjadikan Sirte sebagai ibu kota baru negara Libya, beberapa pejabat melarikan diri ke kota Sabha dan Bani Walid serta mencari perlindungan politik ke negara sekitar. Namun kota Sabha dan Bani Walid berhasil direbut oleh pasukan oposisi. Pada tanggal 20 Oktober, pasukan oposisi berhasil mengambil alih kota Sirte dan membunuh Kadhafi ditempat.

Protes anti pemerintah muncul didaerah utara dan selatan Yaman pada pertengahan Januari 2011. Aksi protes disebabkan oleh adanya isu pemerintahan Yaman yang akan mengubah konstitusi negara, banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan korupsi beserta menuntut pengunduran diri Presiden Yaman yaitu Ali Abdullah Saleh yang sudah mendapatkan perlawanan dari dalam pemerintahannya melalui penasihat pemerintahannya sejak 2009. Pada tanggal 18 Februari 2011 sebanyak 10 ribu

demonstran turun ke kota-kota besar seperti Sana'a, Aden, dan Taiz. Beberapa bulan kemudian terjadi perang saudara antara pasukan pemerintah melawan pasukan pemberontak dan pasukan militer Yaman yang membelot serta berpihak kepada rakyat. Pada tanggal 3 Juni terjadi usaha pembunuhan Ali Abdullah Saleh dengan meledakkan bom di sekitar masjid kepresidenan. Beberapa pejabat termasuk Ali Abdullah Saleh mengalami luka bakar, sehingga Saleh di evakuasi ke Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis dan memberikan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden Abd Rabuh Mansur Hadi. Selama di Arab Saudi, Saleh tetap menegaskan bahwa dia bisa kembali kapan saja ke Yaman. Pada tanggal 23 September, Saleh kembali ke Yaman dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden, yang membuat dia menurunkan jabatannya. Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2012 dan Abd Rabuh Mansur Hadi memenangkan pemilu dengan jumlah suara 99,8%.

Selain negara-negara Arab yang disebutkan di atas, beberapa negara lain di Timur Tengah terkena revolusi Arab juga tapi tidak begitu besar, seperti di negara Bahrain, Arab Saudi, Sudan dan sebagainya. Akan tetapi di negara Suriah, revolusi Arab berlangsung cukup dramatis dengan tewasnya banyak korban jiwa dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sampai akhir tahun 2016, kekuasaan Presiden Suriah Bashar Al Assad belum bisa turun tapi kekacauan semakin meluas di negara ini. Salah satu negara besar yang ikut campur dalam konflik ini adalah negara Kremlin Rusia dan negara Paman Sam Amerika. Suriah dijadikan ajang pertempuran dari negara adikuasa tersebut.

Tinjauan Literatur

Teori yang dipakai dalam karya tulis ini adalah teori Realisme, sedangkan konsep yang dipakai adalah konsep kepentingan nasional, konsep kerjasama keamanan, konsep perang dan konsep *militari industrial complex*.

Realisme adalah teori hubungan internasional yang dibangun berdasarkan empat prinsip utama yaitu (a) pandangan yang pesimis terhadap sifat

dasar manusia; (b) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya adalah konflikual dan konflik internasional umumnya diselesaikan melalui perang; (c) penekanan pada aspek keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara (*national security and state survival*); dan (d) pandangan bahwa karakteristik politik domestik berbeda dengan politik internasional. (Ashari, 2015)

Salah satu konsep dalam teori Realisme adalah konsep Keamanan Nasional. Cara berpikir seperti dalam teori Realisme, dikembangkan terutama oleh Hans J. Morgenthau. Bersamaan dengan konsep *power*, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pendekatan *power* dan *national interest* serta asumsi-asumsinya yang *state centric* telah mendominasi literatur dan penelitian tentang politik internasional di mana-mana, baik yang bersifat "tradisional" maupun yang "behavioral". (Mohtar, 1990)

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah, Morgenthau membangun konsep abstrak dan yang artinya tidak mudah didefinisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuwan dari aliran saintifik, menurut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak

seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan.

Morgenthau percaya bahwa tindakan politik bukanlah fenomena yang terbatas, tepat dan bisa diobservasi dengan jelas. Karena itu, kalau konsep-konsep politik harus mencerminkan setepat-tepatnya kenyataan politik yang memang kabur, maka konsep-konsep itu jangan diberi definisi yang terlalu pasti. Menurut Morgenthau, “Konsep kepentingan nasional itu dalam dua hal mirip dengan ‘konsep umum’ dalam konstitusi (Amerika), seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep itu memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar pengertian minimum itu konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya. Isi konsep itu ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan di dalam mana suatu negara merumuskan politik luar negerinya.

Konsep berikutnya adalah konsep kerjasama keamanan. Realis klasik menganalisis perilaku negara sebagai dibangun di atas perjuangan sifat dasar manusia untuk mengumpulkan kekuasaan. Kompetisi pengumpulan dalam lingkungan anarkhis menciptakan masalah yang tak terelakkan untuk kelangsungan hidup negara, yang pada gilirannya mengumpulkan kekuasaan lebih lanjut adalah solusi yang jelas. Neorealis mengesampingkan asumsi antropologis untuk mendukung keniscayaan sistemik: kebutuhan untuk bertahan hidup dalam anarkhi dimana tidak ada otoritas yang memberikan keamanan berarti bahwa negara sendiri yang harus menyediakan sarana yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Meski asumsi awal antara realisme klasik dan neorealisme berbeda, konsekuensi-konsekuensi yang terkait teori, karakter sistem sebagai anarkis dan berbahaya, dan pembentukan preferensi negara sangat mirip. (Carlsnaes dkk, 2015)

Dalam formulasinya yang singkat oleh Kenneth Waltz dan interpretasi berikut oleh Joseph Grieco dan Mearsheimer, realisme pesimis tentang prospek kerjasama selain yang didasarkan pada jaminan hegemonik, persuasi

dan/ atau paksaan karena preferensi negara diasumsikan tetap sebagai konsekuensi dari keharusan untuk bertahan hidup dalam anarkhi. Masalahnya terletak pada pergeseran jalannya sejarah. Polaritas baru muncul dari perubahan kemampuan, struktur sistem baru berkembang, dan ini dapat membuat teman, sekutu dan mitra kerjasama kita saat ini menjadi pesaing, rival atau musuh kita di kemudian hari. Kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah lain, kita bahkan bisa mengetahui sedikit tentang niatnya di kemudian hari. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar hasil dari kerjasama tidak didistribusikan dengan cara yang dapat merugikan kita (meskipun sedikit) karena margin dapat digunakan oleh mitra kerjasama kita hari ini untuk memaksakan kehendaknya kepada kita di kemudian hari. Ini tidak berarti bahwa kita dapat mengekstrak perolehan dari kerjasama yang merupakan faktor pengendali yang mempengaruhi pilihan strategis kita, tetapi resiko khusus bahwa pihak lain bisa mendapatkan lebih banyak: ini singkatnya adalah masalah ‘perolehan relatif’ yang meminimalkan harapan neorealis pada kerjasama keamanan. Tentu saja, kesamaan perolehan relatif tidak membutuhkan distribusi yang sepadan antara mitra yang tidak sepadan secara matematis, tetapi masalah ini diperdebatkan dalam kerjasama keamanan antara pesaing, dimana menyangkal yang lain unggul dalam sumber daya yang dapat menimbulkan bahaya dimasa mendatang sangat penting. Karena distribusi yang sepadan sangat sulit dihitung secara tepat, dan bahkan sulit dilaksanakan, peluang untuk kerjasama yang berhasil dengan sendirinya sangat terbatas. Lembaga tidak banyak membantu, mereka adalah epifenomena yang larut dan layu dalam kepentingan aktor utama negara. Mereka sendiri tidak memiliki pengaruh luar biasa pada kepentingan perilaku berikutnya ini, seperti yang dikatakan oleh Kenneth Waltz.

Konsep selanjutnya adalah konsep perang. Tradisi realis telah mendominasi studi perang, dan meliputi keturunan intelektual Machiavelli, Hobbes dan Rousseau. Semua mempunyai perangkat asumsi yang sama: aktor kunci dalam politik dunia adalah negara-negara berdaulat yang

bertindak rasional untuk memajukan keamanan, kekuasaan dan kekayaan mereka dalam sebuah sistem internasional yang anarkhis, didefinisikan sebagai tidak adanya otoritas pemerintah yang sah untuk mengatur perselisihan dan menegakkan perjanjian antara negara atau aktor-aktor lain. Mengingat ketidakpastian menyangkut tujuan musuh pada saat ini dan masa depan, para pemimpin politik fokus pada kebutuhan keamanan jangka pendek, mengadopsi pemikiran akibat-terburuk, terlibat dalam perebutan kekuasaan dan keamanan, dan memanfaatkan ancaman koersif untuk memajukan kepentingan mereka, mempengaruhi musuh dan mempertahankan reputasi mereka. (Carlsnaes dkk, 2015)

Konsep yang terakhir adalah konsep *military industrial complex*. Istilah yang dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower merujuk pada kelompok yang terdiri dari kalangan militer, pembuat dan pemasok senjata, serta elemen sipil dalam pemerintahan yang memiliki kaitan dengan industri pertahanan. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan diantara ketiga elemen tersebut. Fenomena yang banyak dijumpai di negara industri maju ini membentuk pola hubungan antarelemen yang saling menguntungkan. Tiap-tiap kelompok berupaya menekan pemerintah untuk terus meningkatkan kekuatan militer dengan argumen masing-masing. Fenomena ini dipandang negatif karena dapat mendorong terjadinya pengembangan persenjataan yang melebihi kebutuhan serta memicu terjadinya perlombaan senjata. Pada awalnya *military industrial complex* sering diidentikkan dengan Amerika Serikat karena besarnya anggaran pertahanan negara tersebut. Dewasa ini fenomena *military industrial complex* juga ditemui negara-negara pengeksport senjata terbesar seperti Rusia, Afrika Selatan, Brasil, Cina, Israel, Perancis dan Inggris. (Ashari, 2015)

Pembahasan

Revolusi rakyat Suriah tidaklah teretus secara spontan. meski revolusi tersebut muncul di tengah-tengah fenomena revolusi Arab/ *Arab Spring* yang melanda dunia Arab, namun tidak

bisa dibenarkan bila *Arab Spring* menjadi satu-satunya sebab terjadinya revolusi di Suriah. (dakwatuna.com)

Gelombang revolusi Suriah merupakan puncak dari akumulasi berbagai faktor represif dan kemarahan rakyat Suriah yang sudah berlangsung hampir setengah abad, dan *Arab Spring* menjadi momen yang tepat sekaligus memberikan rasa percaya diri bahwa rakyat Suriah juga mampu melawan pemerintah yang otoriter.

Seperti rezim-rezim Arab lainnya, rezim pemerintah Suriah cenderung korup, represif, dan tidak memperhatikan kepentingan dan apresiasi masyarakat, atau yang Clement Henry Moore sebut dengan *bunker regimes*. Model ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, atau tepatnya sejak Hafiz Al Assad melangkah ke kursi Presiden bersama partai Sosialis Ba'ats (*hizb al-ba'ats al-Isytiraki*) tahun 1963.

Sejak saat itu, secara sistematis dan terus-menerus rezim Hafiz melakukan segala hal untuk merealisasikan sebuah kekuasaan mutlak di Suriah. Dengan berkoalisi dengan militer, rezim Hafiz mengambil berbagai kebijakan untuk mengokohkan kekuasaan. Kekuatan militer dan pihak keamanan ditingkatkan, hingga menjadi kekuatan militer terbesar ke dua di kawasan regional setelah Mesir. Konstitusi dan undang-undang pun tak luput direkayasa guna mencegah tumbuh dan berkembangnya segala gerakan oposisi, baik yang berideologi Islam, liberal hingga sosialis. Sepanjang tahun 1979-1982, rezim Hafiz membasmi akar *Jamaah Ikhwanul Muslimin (IM)* Suriah, khususnya sayap militer mereka. Dengan cara inilah, rezim Suriah di bawah kepemimpinan Hafiz Al Assad bisa bertahan.

Pada tahun 2000, ketika umur Hafiz Al Assad semakin senja, ia mengagendakan 'pewarisan' kekuasaan kepada putranya, Bashar Al Assad. Parlemen Suriah lalu mengadakan rapat luar biasa untuk mengamendemen konstitusi dengan mengubah batas minimal umur Presiden Suriah. Sehingga, sang 'putra mahkota' Bashar Al Assad bisa diajukan menjadi Presiden dan memenangkan referendum pada tahun tersebut. Bashar Al Assad

kemudian kembali terpilih pada 2007, dan masih menjabat sebagai Presiden Suriah hingga waktu yang cukup lama.

Peran Partai Sosialis Ba'ats (*Hizb al-ba'ats al-Isytiraki*) sebagai partai penguasa di Suriah juga sangat besar. Di parlemen, partai ini membentuk koalisi Front Nasional Progresif (*al-jabhah al-Wathaniyah at-Taqaddumiyah*) bersama dengan partai-partai lain, sehingga bisa menguasai pos-pos pembuat kebijakan publik di Suriah. Uniknya, mayoritas petinggi partai ini merupakan anggota kelompok Syiah *Alawiyah*, yang jumlahnya tidak lebih dari 13% dari jumlah keseluruhan rakyat Suriah. Sehingga, banyak pengamat melihat bahwa Suriah merupakan salah satu benteng Syiah di kawasan itu bersama dengan Iran dan Irak di bawah kepemimpinan Alwi Al Maliki.

Keberhasilan revolusi Tunisia dan Mesir di awal tahun 2011, mendorong para pemuda dan aktivis Suriah untuk menggelar aksi serupa di negaranya. Dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi utama, mereka mempropagandakan rakyat untuk hadir dalam aksi protes rakyat “hari kemarahan Suriah” pada 15 Maret. Aksi protes tersebut lalu berkembang menjadi seruan untuk menjatuhkan rezim Bashar Al Assad.

Aksi protes rakyat Suriah dengan sangat cepat menyebar ke berbagai kota. Pada 25 Maret 2011, hari yang mereka sebut dengan “Hari kejayaan Suriah”, dengan serentak rakyat Suriah menggelar demonstrasi besar di tujuh propinsi dari 14 propinsi yang ada.

Eskalasi demonstrasi rakyat yang begitu cepat dan signifikan di berbagai penjuru kota akhirnya memaksa Bashar Al Assad untuk berpidato di depan parlemen pada 31 Maret. Dengan siasat politiknya, Bashar mencoba menenangkan kemarahan rakyat dengan berjanji akan mengagendakan reformasi politik di Suriah. Bashar juga membentuk pemerintahan baru, yang ternyata komposisinya tidak jauh berbeda dengan pemerintah sebelumnya.

Selain itu, Bashar berjanji akan segera mengusut segala pihak yang terbukti melakukan kekerasan terhadap para demonstran. Segala

siasat damai yang dilakukan Bashar untuk meraih hati rakyat dan menghentikan gelombang revolusi ternyata tidak membuahkan hasil. Keberhasilan revolusi Tunisia dan Mesir membuat rakyat semakin percaya diri dan yakin bahwa keberhasilan revolusi Suriah adalah suatu keniscayaan.

Bashar semakin emosi. Ia pun kemudian menerapkan siasat baru. Dengan dukungan penuh militer, pada akhir April 2011 militer Suriah mulai melakukan tekanan dan kekerasan kepada para demonstran. Korban yang berjatuhan meningkat tajam. Awal Juni, pihak militer Suriah menembaki para demonstran di kota Hamah sehingga menewaskan puluhan orang. Tindak kekerasan semacam itu masih terus berlangsung cukup lama. Awal Februari 2012, serangan bom dilancarkan militer pro pemerintah di wilayah Khalidiya, provinsi Homs. Lalu, disusul dengan berbagai operasi militer di berbagai daerah dan merupakan operasi paling kejam selama masa revolusi. Hampir seribu orang meninggal dalam jangka waktu hanya dua minggu. Yang lebih ironis, adalah pada hari digelarnya referendum nasional terkait konstitusi baru Suriah, rezim Bashar terus melakukan tindak kekerasan di Homs dan Hamah hingga menelan korban jiwa sebanyak 65 orang.

Tidak hanya warga sipil saja yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan otoriter Basar Al Assad, tetapi anak-anak sekolah juga ikut menyalurkan aspirasinya dengan melakukan aksi turun ke jalan untuk menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter dan telah lama berkuasa di negara Suriah. (Kuncahyono, 2013)

Hingga 30 Mei 2013, dalam 805 hari revolusi tercatat setidaknya 69.191 korban jiwa, sebagaimana yang dirilis situs *syriansyuhada.com*. Besar kemungkinan, jumlah sesungguhnya korban revolusi Suriah lebih besar dari data tersebut.

Kekejaman yang dilakukan rezim Bashar dan pelanggaran atas hak asasi manusia, membuat dunia internasional menyatakan sikap tegas. Pada pertengahan Agustus 2011, Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Uni Eropa dan Kanada

menyatakan bahwa rezim Suriah tidak lagi sah. Mereka juga menyarankan Bashar untuk segera meletakkan jabatan. (dakwatuna.com)

Reaksi Internasional berlanjut, dengan agenda resolusi Dewan Keamanan PBB. Sekutu-sekutu kapitalis yang menjabat sebagai polisi dunia tersebut ingin menerapkan skenario Libya atas Suriah, dengan menjadikan isu perlindungan hak asasi manusia sebagai alasan. Mereka hendak menguasai Suriah yang mempunyai geostrategi, pasar dan sumber daya alam yang sangat menggiurkan. Namun, seperti telah diprediksikan, Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Agenda intervensi asing akhirnya gagal diterapkan atas Suriah.

Liga Arab juga tidak tinggal diam. Organisasi regional Arab ini mengutus para pengamatnya ke Suriah. Mereka kemudian menawarkan protokol pengamat Arab yang menjadi bagian dari resolusi Liga Arab. Pada mulanya Suriah bersedia menandatangani protokol tersebut. Akan tetapi, ketika protokol berikutnya menawarkan penyelesaian konflik dengan menyarankan Bashar agar menyerahkan kekuasaan pada wakilnya, dengan tegas Bashar menolak tawaran tersebut. Para pengamat Liga Arab pun akhirnya keluar, dan diganti dengan pengutusan pasukan penjaga keamanan.

Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh dunia Internasional adalah dibentuknya apa yang disebut dengan sahabat Suriah, yang terdiri dari negara-negara Arab dan Barat. Dalam pertemuan yang pertama, sahabat Suriah menuntut rezim Bashar untuk melakukan genjatan senjata. Pertemuan yang itu juga meminta Suriah mengizinkan datangnya bantuan dari organisasi kemanusiaan bagi warga sipil yang mengalami penderitaan.

Rusia sebagai negara adikuasa dapat dikatakan sebagai sekutu Suriah. Pada tahun 1946 hubungan Suriah dan Rusia mulai dirintis, Uni Soviet merupakan negara adikuasa pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah. Hubungan diplomatik mereka semakin baik, pada tahun 1972 Hafiz Al Assad menandatangani perjanjian pakta pertahanan keamanan dengan Uni Soviet. Pada tanggal 8 Oktober 1980 Suriah menjalin hubungan

kerjasamanya dengan di tandatanganinya perjanjian pakta pertahanan lanjutan dengan Sekretaris Jendral Uni Soviet Leonid Brezhnev. Pakta pertahanan di perpanjang 20 tahun, dan pada tahun 1987 pemerintahan Michael Gorbachev berjanji akan terus melakukan kerjasama dengan Suriah dengan memberikan bantuan Ekonomi dan Militer. Hingga sampai pada pemerintahan Bashar Al Assad, hubungan kerjasama yang secara histori sudah terbentuk inilah yang membuat hubungan antar kedua negara tersebut sangat dekat. (umy.ac.id).

Bagi Uni Soviet, Suriah merupakan aliansi utama mereka untuk memperkuat eksistensinya di Timur Tengah. Posisi Suriah yang sangat strategis bagi eksistensi Uni soviet di Timur Tengah mendorong kerja sama antar kedua negara tersebut, letak Suriah yang langsung berbatasan dengan laut mediterania membuat Suriah menjadi negara yang strategis, banyaknya kerjasama telah mempererat hubungan mereka. Pada tahun 1970 Uni Soviet memberikan bantuan perlengkapan militer dalam jumlah besar kepada Suriah, dan pada tahun 1971 Uni Soviet membangun pangkalan angkatan laut militernya di Suriah. Pada tahun 1991 dengan runtuhnya kekuasaan Uni Soviet, banyaknya aliansi dari Uni Soviet yang pindah ke Amerika Serikat. Hal ini dimanfaatkan Amerika Serikat dengan mencoba menjalin hubungan dengan Suriah. Akan tetapi negara Suriah tetap setia dengan sekutunya yaitu Rusia. Setelah kematian Presiden Suriah Hafiz Al Assad di tahun 2000, kekuasaan Suriah digantikan oleh anaknya Bassar Al Assad. Dengan bergantinya kekuasaan di Suriah menjadikan hubungan negara ini dengan Amerika Serikat sedikit menjauh. Namun Suriah semakin dekat dan akrab dengan Rusia. Karena banyak hubungan yang terjalin antara Suriah dan Rusia pada masa Presiden Hafiz Al Assad membuat Suriah tetap konsisten terhadap negara Kremlin ini.

Ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Rusia di tahun 2005, Suriah ikut membantu dengan memberikan tawaran pembelian senjata dengan nilai 2 miliar dollar AS untuk pembelian sistem pertahanan udara baru. Bassar Al Assad juga menawarkan kepada Rusia

untuk menanamkan perusahaan Rusia di Suriah. Kerja sama antar kedua negara ini juga di tandai dengan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Dimitri Medvedev ke Suriah, ini merupakan kunjungan yang pertama kalinya oleh Presiden Rusia ke Suriah. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 10-11 Mei 2010 ini menciptakan kesepakatan bahwa Rusia akan membantu Suriah dalam membangun infrastruktur gas dan minyak serta pengembangan pusat Energi Nuklir. Walaupun Suriah bukan anggota blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia), namun Suriah merupakan rezim Ba'athis yang berorientasi Sosialis yang dimana hal ini identik dengan blok Timur, dimana adanya kesamaan paham. Secara ideologis, Rezim Bashar Al Assad yang berkuasa di Suriah lebih berorientasi Sosialis daripada sebagian rezim yang berkuasa di Arab, selain itu rezim Bashar Al Assad juga lebih cocok diidentifikasi blok Timur daripada non-blok. Suriah juga dipandang sebagai aset Geostrategis penting bagi Rusia. Karena satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di laut tengah hanya ada di Suriah di pelabuhan Tartus.

Hubungan baik antara Rusia dan Suriah semakin dapat dilihat pasca terjadinya konflik internal di Suriah, Rusia memberikan banyak bantuan dalam mengatasi konflik yang ada di Suriah. Sejak 2011 lalu Rusia memberikan dukungannya kepada Pemerintahan Bashar Al Assad dalam mengatasi konflik di Suriah, dari mengeluarkan hak Veto atas Resolusi Konflik yang ingin dikeluarkan PBB. Dengan Rusia mengeluarkan hak Veto nya maka Resolusi ini tidak bisa dijalankan, Rusia juga mendukung penuh Pemerintahan Bashar Al Assad dengan membantu mengirimkan persenjataan ke Suriah dalam melawan para pihak oposisi pada tanggal 17 Agustus 2011. Hubungan Rusia dan Suriah semakin erat dari hari ke hari, terlihat dari upaya Rusia yang tak gentar dalam membantu Pemerintahan Bashar dalam melawan para pemberontak di negaranya, agar tercipta kestabilan politik dan ekonomi di Suriah.

Rusia sebagai negara adikuasa berusaha ikut campur dalam konflik Suriah. Perang Suriah merupakan tempat komersial yang sempurna

bagi para produsen senjata Rusia. Moskow bisa mendapatkan uang lebih banyak setelah dunia melihat senjata buatan Rusia, baik lama maupun baru, yang teruji di medan tempur oleh angkatan udara Rusia dan militer Presiden Suriah Bashar Al Assad. (hizbut-tahir.or.id)

Perang Suriah telah membantu Moskow meningkatkan statusnya sebagai produsen dan eksportir senjata besar, yang merupakan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Ini merupakan kabar baik bagi Presiden Vladimir Putin di tengah krisis ekonomi yang parah yang disebabkan oleh rendahnya harga minyak, jatuhnya mata uang Rubel, dan sanksi-sanksi Barat yang diberlakukan atas tindakan Rusia di Ukraina.

Operasi militer itu memberikan kesempatan untuk menguji dalam pertempuran “Semua sistem militer generasi terakhir yang tidak bisa diuji oleh Rusia dalam kondisi militer, yaitu persenjataan presisi tinggi, rudal, helikopter, pesawat dan rudal jelajah”, kata Ruslan Pukhov, Direktur Center for Analysis of Strategies and Technologies, yang bermarkas di Moskow. Harian Kommersant mengatakan pada Maret 2016 lalu, dengan mengutip orang dalam di Kremlin dan para analis militer, bahwa “efek marketing” dari konflik Suriah akan meningkatkan penjualan senjata Rusia hingga \$7 milyar. Al Jazair telah membeli selusin pembom tempur Sukhoi Su-32, suatu versi ekspor dari Su-34 yang terbukti mematikan di Suriah.

Pakistan, Vietnam, Indonesia dan sejumlah negara Amerika Latin juga ingin membeli lebih banyak pesawat pembom dan helikopter, tetapi mereka juga ingin yang lebih dari sekedar pesawat, yang merupakan tulang punggung ekspor senjata Rusia sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991. Pada tahun 2015, ekspor senjata Rusia mencapai rekor dengan nilai \$14.5 miliar karena “keandalan dan efektivitas yang tinggi” dari persenjataan tersebut, Presiden Putin mengatakannya pada akhir Maret 2016.

Angka tersebut lebih tinggi dari yang diharapkan, dan pesanan asing bagi senjata Rusia melebihi \$56 miliar, kata Putin saat menyampaikan pidato pada pertemuan para

pejabat pertahanan. Pada tanggal 7 Oktober 2015, pada hari ulang tahun ke-63 Putin, empat kapal perang Rusia meluncurkan rudal jelajah jarak jauh yang menyerang 11 target di Suriah, suatu jarak yang lebih dari 1.500 kilometer. Pada bulan Desember, sebuah kapal selam Rusia yang berada di Laut Mediterania meluncurkan rudal jelajah yang sama terhadap sasaran-sasaran di provinsi Raqqa, Suriah.

Tentu saja, penyebaran senjata-senjata ini, serta koordinasi intervensi militer Moskow yang mencolok adalah mustahil tanpa adanya serangkaian reformasi militer yang terjadi di Rusia. Reformasi militer itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan “sipil” yang pertama yaitu Anatoly Serdyukov, yang pernah memiliki sebuah bengkel mebel dan merupakan anak menantu dari mantan Perdana Menteri Rusia.

Kondisi perang saudara di Suriah yang masih memburuk dan memaksa jutaan warganya membanjiri negara-negara tetangga, terutama serbuan pengungsi ke benua Eropa, kian melibatkan negara-negara sekutu dan lawan rezim Bashar Al Assad untuk lebih berperan di medan tempur. Krisis Suriah menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan oleh para pemimpin dunia dalam Sidang Umum PBB ke-70 di New York, terlebih setelah Pemerintah Rusia meningkatkan keberadaan kekuatan militernya di Latakia, kota pesisir Suriah. (mirajnews.com)

Sebagai pemimpin koalisi lebih 60 negara dalam memerangi *kelompok Islamic State (ISIS/Daesh)* di Suriah, Presiden Amerika Serikat Barack Obama merasa wajib bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memungkinkan terjalannya koordinasi bersama terkait peran kedua negara di tanah Suriah. Namun pertemuan kedua pemimpin itu masih mengalami benturan dalam memandang krisis Suriah, terutama tentang kursi Presiden Suriah yang masih diduduki oleh Assad.

Presiden Obama mendesak transisi politik di Suriah untuk menggantikan Bashar, tetapi Putin memperingatkan itu akan menjadi kesalahan besar jika rezim sekarang disingkirkan dari kekuasaan. Di depan Majelis Umum PBB, Putin mengatakan, adalah kesalahan besar untuk tidak

melibatkan tentara Suriah dalam memerangi ISIS. Menurutnya, militer Suriah adalah satu-satunya kekuatan yang benar-benar memerangi kelompok bersenjata ISIS di negara itu.

Nikolay Kozhanov dari Lembaga Kebijakan Chatham House di London, mengatakan Rusia saat ini menempatkan 20 jet tempur dan sejumlah helikopter di Suriah. Kepada *Anadolu Agency*, Kozhanov mengatakan, Moskow kemungkinan mengirim sistem pertahanan anti rudal di dua pangkalan militernya di Latakia, Suriah. Rusia juga diduga mengirimkan 1.700 tentara ke Suriah barat untuk membantu menopang rezim Bashar atas nama memerangi ISIS dan oposisi. Langkah militer Rusia ini menimbulkan kekhawatiran bagi Washington dan negara-negara sekutunya, terutama Israel.

Langkah itu memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terbang ke Moskow bertemu Putin pada hari Senin tanggal 21 September 2015. Pertemuan itu bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrokan antara pasukan militer Rusia dan Israel di Timur Tengah. Netanyahu mencari kepastian dari Putin tentang penyebaran militernya di Suriah. Israel mengkhawatirkan adanya risiko senjata dikirim kepada kelompok bersenjata di perbatasan Suriah-Israel. Namun Putin mengatakan kepada tamunya itu, tindakan Rusia di Timur Tengah akan selalu “bertanggung jawab”. Bahkan Obama harus melakukan pertemuan berisiko dengan Putin, di mana hubungan kedua negara “tidak baik” untuk krisis di Ukraina.

Melihat Rusia membantu pemerintah Suriah, maka Amerika berusaha untuk membantu para oposisi di Suriah. Rusia mengatakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 bahwa keputusan Amerika Serikat melonggarkan larangan untuk mempersenjatai para oposisi Suriah telah membuka jalan bagi pengiriman rudal anti pesawat panggul, sebuah langkah yang dikatakan mengancam pasukan Rusia di Suriah. Moskow tahun 2015 lalu meluncurkan operasi militer serangan udara di Suriah untuk membantu Presiden Bashar Al Assad dan pasukannya mengambil alih wilayah yang jatuh ke tangan para oposisi, beberapa dari mereka didukung oleh

Amerika Serikat. (wartaekonomi.co.id)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan perubahan kebijakan melonggarkan larangan suplai senjata telah ditetapkan dalam RUU anggaran pertahanan Amerika yang baru, dan bahwa Moskow menganggap langkah tersebut sebagai tindakan permusuhan.

Presiden Amerika Barack Obama, yang mengkritik intervensi Rusia di Suriah secara tajam, mengesahkan RUU kebijakan pertahanan tahunan menjadi undang-undang tahun 2016 lalu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Amerika Mark Toner, mengabaikan tuntutan Rusia dengan mengatakan pemerintah Amerika tetap melakukan penyediaan misil anti pesawat portabel, atau MANPADS, bagi kelompok oposisi Suriah.

Mark Toner meyakinkan bahwa pengiriman MANPADS akan digunakan untuk penegakan HAM dan perlindungan warga sipil di Suriah, merujuk pada kekhawatiran misil anti pesawat portable dapat jatuh ke tangan militan radikal Islamis dan digunakan menyerang pesawat sipil.

Kesepakatan Pengesahan Pertahanan Nasional, disahkan menjadi undang-undang oleh Obama pada tanggal 23 Desember 2016, nampaknya dirancang untuk meredakan kekhawatiran pemerintah, namun memunculkan lembaran baru kekeliruan Kongres terhadap keputusan Presiden untuk menyediakannya.

Undang-undang melarang Kementerian Pertahanan Amerika membelanjakan dana untuk MANPADS bagi kelompok oposisi Suriah, kecuali menteri Sekretaris Negara dan Pertahanan mengirimkan laporan ke komite Kongres yang menjelaskan keputusan untuk melakukannya. Laporan harus menyertakan kelompok mana yang menerima senjata tersebut, analisis intelijen terhadap kelompok, serta jenis dan jumlah MANPADS yang disediakan.

Moskow menyebut RUU itu menghapus pembatasan persediaan senjata semacam itu bagi oposisi Suriah. Mereka mengatakan bahwa bantuan Amerika kepada para oposisi Suriah akan dijadikan sebagai alat mesin pembunuh. Karena senjata yang diberikan kepada para oposisi

kemungkinan bisa jatuh ke tangan kelompok Islam radikal yang dianggap mereka sebagai kaum jihadis.

Keputusan Amerika adalah ancaman langsung bagi angkatan udara Rusia, bagi anggota militer Rusia lainnya, serta bagi Kedutaan Besar Rusia di Damaskus, kata Zakharova. Zakharova menuding pemerintahan Obama mencoba “memasang jebakan” bagi pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang, dengan mencoba membuat pemerintahan yang baru meneruskan apa yang dirinya istilahkan sebagai “barisan anti Rusia” Washington. Trump, selama kampanye pemilu mengatakan dirinya tertarik untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Moskow dan berbicara secara positif tentang kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

Pertukaran timbal balik antar Trump dan Putin tentang senjata nuklir tahun 2016 lalu menguji janji Partai Republik untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia. Pemerintahan Obama dan kantor intelijen Amerika menuding Rusia mencoba mencampuri pemilu negeri Paman Sam dengan meretas akun Partai Demokrat.

Pada kesempatan di PBB, tanpa menyebut Amerika Serikat, Presiden Rusia juga mengkritik Barat karena mempersenjatai oposisi moderat di Suriah. Obama telah menuai kritikan keras dari kalangan kongres atas gagalannya program pelatihan dan mempersenjatai oposisi moderat Suriah. Sebelumnya dilaporkan, kelompok oposisi Suriah yang dilatih dan dididik AS dilaporkan menyerahkan kendaraan dan senjatanya kepada kelompok oposisi Nusra Front demi mendapat perjalanan yang aman. (mirajnews.com)

Duta Besar Rusia untuk Ankara ditembak mati dalam sebuah serangan di sanggar seni di ibukota Turki. Serangan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh seorang pria bersenjata sambil berteriak, “Jangan lupakan Aleppo”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan kematian Andrei Karlov menandai salah satu dari limpahan paling parah dari perang Suriah ke Turki. Hubungan Rusia dan Turki sejak lama bermasalah atas perang itu, dengan keduanya mendukung pihak berlawanan. (tirto.id)

Rusia dan Turki terlibat dalam perang di Suriah, yang berbatasan dengan Turki. Turki menjadi penentang keras Presiden Suriah Bashar Al Assad, sementara Rusia mengerahkan tentara dan angkatan udaranya mendukung pemimpin Suriah tersebut. Ketegangan meningkat dalam beberapa pekan belakangan saat pasukan Suriah dukungan Rusia berjuang menguasai bagian timur Aleppo, yang memicu aliran pengungsi. Keterlibatan Rusia di Suriah sudah berlangsung lama. Pada pertengahan Maret 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan menarik pasukannya dari Suriah setelah hampir tujuh bulan menggelar operasi militer di sana. Keputusan ini mengagetkan, mengingat kehadiran Rusia cukup membantu Presiden Bashar Al Assad dalam merebut kembali wilayah yang diduduki oposisi. Namun, Rusia ternyata tak pernah benar-benar pergi. Mereka masih menyisakan sebagian misil dan pertahanan angkatan lautnya.

Rusia mulai membangun pangkalan udara militer di Khmeimim, Lattakia pada Agustus 2015. Operasi tempur dimulai 30 September 2015, dan kehadiran Rusia menjadi jaminan kemenangan Bashar. Dalam waktu enam bulan, pemberontakan di Provinsi Homs, Lattakia dan Hama berhasil diredam. Palmyra yang dikuasai ISIS sudah diblokade selama dua bulan terakhir.

Kemajuan terbesar adalah saat dengan bantuan udara Kremlin, rezim Bashar berhasil menutup total pintu masuk menuju Aleppo dari Turki pada awal Februari 2016. Kota terbesar di Suriah ini merupakan ibukota oposisi. Di sana pulalah revolusi menuntut Bashar pertama kali bergelora. Blokade masif dari tentara Suriah di darat dan serangan bertubi-tubi Rusia dari udara itu bisa membuat Aleppo direbut kembali dalam waktu singkat. Tetapi, di saat kemenangan sudah di depan mata, Rusia memutuskan pergi dari Suriah secara tiba-tiba.

Selama enam bulan menggelar operasi militer di Suriah sebelum akhirnya memutuskan keluar, Rusia setidaknya sudah melakukan 9 ribu serangan bom. Terlepas dari klaim kesuksesan Kremlin, mereka kini sedang disorot akibat pelanggaran HAM yang dilakukan. Laporan lembaga independen *Syrian Network for Human*

Rights (SNHR) mencatat bahwa sejak invasi dimulai 30 September 2015 hingga 14 Maret 2016, terdapat 1.984 korban sipil. Di antaranya ada 443 anak-anak dan 286 perempuan. Saat pengeboman terjadi, 85% korban berada di wilayah yang bukan area kontak tembak serta bukan bangunan militer. Artinya, armada Rusia sering menasar sipil.

Dokumentasi NSHR juga mencatat Rusia menyerang tidak kurang dari 235 fasilitas vital sipil, dengan rincian: 52 fasilitas medis (rumah sakit dan ambulans), 47 tempat ibadah, 56 infrastruktur bangunan pribadi sipil (apartemen dan rumah), 47 fasilitas pendidikan, 25 fasilitas umum, 2 pusat kebudayaan, dan 6 kamp pengungsian.

Posisi Rusia dalam kancah politik internasional kini memang disorot. Selain di Suriah, intervensi Putin di konflik Ukraina dengan menganeksasi Krimea dan dukungan senjata bagi para pemberontak di timur Ukraina membuat mereka dikucilkan dunia Barat. Sejak 2014 lalu, koalisi Barat yang dipimpin Uni Eropa dan Amerika Serikat sepakat untuk mengembargo total Rusia di berbagai bidang.

Keputusan Rusia membantu Bashar di konflik Suriah pun bisa dianggap sekadar menjadikannya proksi dalam persaingannya dengan Barat. Adagium “musuhmu adalah kawanku” betul-betul diterapkan Putin. Rusia membantu Bashar karena pihak oposisi sebelumnya didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Para pendukung oposisi itu berharap kejatuhan Bashar karena secara geografis hal itu akan memutus aliran hubungan Teheran-Lebanon. Selama ini, poros Teheran-Damaskus-Beirut ditakutkan mengancam eksistensi si anak emas Amerika Serikat, yaitu Israel di Timur Tengah. Kejatuhan Bashar diharapkan memberi efek domino pada kejatuhan Iran dan Lebanon.

Di sisi lain, negara-negara Sunni di Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi tidak suka dengan kemajuan Iran sebagai pemimpin negara-negara Syiah. Kekuasaan Iran mengancam hegemoni Saudi di Teluk Persia.

Kepentingan negara-negara Barat menyokong Saudi tentunya berbeda dengan

kepentingan Putin mendukung Suriah. Lalu, apa motif sebenarnya Putin menerjunkan pasukan di Suriah? Diprediksi, Rusia ingin menjadikan perang di Suriah sebagai panggung untuk memposisikan diri sebagai kekuatan global, selain untuk menguji kekuatan angkatan perangnya, sesuai dengan konsep kepentingan nasional dari teori Realis.

Seorang ahli Kebijakan Pertahanan Eurasia dari Chatham House London yang bernama Keir Giles menganggap kebijakan Obama-lah yang memungkinkan Putin mudah masuk ke Suriah. Sikap Amerika yang tidak mau secara serius terlibat di perang Suriah membuat kevakuman kekuasaan itu cepat diisi oleh Rusia.

Tony van der Togt, ahli hubungan internasional Rusia dari Clingendael Institute, Den Haag, menilai Rusia memanfaatkan kesalahan Amerika di masa kepemimpinan George W. Bush yang menginvasi Irak dan Afganistan. Putin memanfaatkan keengganan Obama yang tidak mau mengulangi kesalahan Bush di Afganistan dan Irak. Ahli lain, Mamuka Tsereteli dari *Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS)*, Washington, melihat Putin berhasil mengambil jalan berbeda dari Amerika. Ia mendorong perundingan damai di Swiss. "Putin pergi ke Jenewa dengan memiliki posisi yang kuat," kata Tsereteli. Putin pun bisa membanggakan diri sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Ini adalah langkah cerdik Putin di tengah rencana agresif Arab Saudi, Turki, serta 18 negara muslim lain untuk menggelar operasi darat "*North Thunder*" di Suriah utara. Dengan dalih memerangi ISIS, sebanyak 150.000 pasukan, 2.540 jet tempur, 20.000 tank, dan 460 helikopter, hendak dilibatkan Arab Saudi dan sekutunya dalam tragedi perang Suriah. Seandainya operasi ini dilakukan, tentu biaya perang Rusia akan meningkat tajam. Tanpa operasi darat saja, tragedi perang Suriah masih akan berlangsung lama. Jika Rusia hanya melakukan operasi tempur lewat udara semata, maka kegagalan koalisi AS akan terulang.

Kelompok ISIS dan oposisi memiliki sumber daya yang tak terbatas. Rusia sebenarnya bisa

memulai operasi darat, tetapi momentum ini tidak bisa disamakan saat mereka menginvasi Afganistan pada dekade 1980-an. Selain situasi kawan-lawan yang sulit diprediksi, kondisi ekonomi Rusia sekarang tidak sekuat Uni Soviet di masa itu. Dulu, pendapatan Soviet dari harga minyak yang tinggi dapat disalurkan untuk biaya konflik.

Tony van der Togt merasa motivasi Putin keluar dari Suriah dan mengkampanyekan perdamaian tidak lepas dari faktor uang. Anggaran Rusia berada di bawah tekanan berat karena harga minyak yang rendah dan sanksi internasional. Tahun 2015 lalu, mereka menggunakan \$100 per barel minyak untuk membiayai anggaran negara. Sebanyak 50% dari anggaran Rusia berasal dari pendapatan minyak dan gas. Tapi, situasi perdagangan minyak sudah jauh berbeda di tahun 2016. Harga minyak tahun 2016 berada di bawah \$40 per barel. Rusia pun berada dalam ancaman krisis fiskal. Tahun 2015 lalu, Ekonomi Rusia telah menyusut 3,7% dan terus melemah 1% lagi di tahun tersebut.

Putin menghadapi pilihan dilematis. Dia memerintahkan semua kementerian untuk memotong anggaran sebesar 20%, dan anggaran militer sebesar 5%. Bagi kalangan militer, ini sangat mengagetkan karena bakal menjadi pemangkasan terbesar di bidang pertahanan sejak Putin menjabat pada tahun 2000.

Selain itu, Putin juga merasa unjuk kekuatan yang dia lakukan di Suriah harus segera diakhiri. Leonid Bershidsky, seorang jurnalis ekonomi kenamaan di Rusia dalam kolomnya di Bloomberg memaparkan analisa menarik. Dari awal, Kremlin memang sudah merencanakan operasi di Suriah akan berlangsung sebentar. Tujuannya adalah untuk menguji coba kekuatan perang dan pamer teknologi senjata baru. Dalam hal pengalaman perang, sejak Uni Soviet bubar 1991, Rusia lebih banyak berperang di wilayah sendiri atau bekas jajahannya. Kesempatan militer untuk *show off* pun otomatis terbatas. Karenanya, operasi skala besar atau peperangan hibrida tak pernah Rusia lakukan. Lawan mereka hanyalah gerilyawan Chechnya. Dukungan untuk kelompok separatist Ukraina dan invasi ke

Georgia pada 2008 lalu bagi jenderal-jenderal Rusia adalah perang yang terlalu mudah.

Selain unjuk kekuatan, perang berskala besar juga merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan persenjataan baru pada calon pembeli. Contohnya adalah saat Rusia berhasil menguji coba rudal jelajah 3M-14 dari laut Kaspia menuju Suriah, yang jaraknya lebih dari 1.500 km. Berdasarkan perjanjian internasional, jika tak dipakai untuk perang, rudal hanya boleh dipakai untuk radius maksimal 300 km.

Di Suriah jugalah pesawat jet Sukhoi SU-30 dan SU-35S merasakan medan perang sesungguhnya. Dua jenis pesawat tempur ini sudah dijual ke 11 negara, termasuk Indonesia. Jika membandingkan jumlah operasional yang terlibat di Suriah, angka itu tidak sebanding dengan operasi militer Rusia di Georgia yang hanya melibatkan 9.000 tentara, 500 tank dan 200 pesawat tempur. Dalam soal publisitas, Rusia pun telah meniru AS. Kini mereka rajin mendokumentasikan kesuksesan peluncuran rudal dan serangan bom. Rekaman-rekaman itu kemudian rutin diposkan pada laman Facebook dan Twitter dalam berbagai bahasa.

Namun, semua unjuk dan promosi kekuatan militer itu sekarang sudah dianggap menghabiskan terlalu banyak biaya. Dana \$2,2 miliar di Suriah memang masih terasa kecil saat dibandingkan dengan anggaran militer Rusia 2015 lalu sebesar \$50 miliar. Tapi, jika menilik dari nilai ekspor militer Rusia pada 2015 sebesar \$15,5 miliar, maka “biaya promosi” di Suriah sebesar \$2,2 miliar atau mencapai 14% penjualan itu bisa dianggap terlalu besar. Wajar jika Putin memilih berhenti dan pergi. Apalagi, operasi darat *North Thunder* yang diwacanakan Arab Saudi dan sekutunya diperkirakan menyedot anggaran yang lebih besar lagi. Selain biaya akan membengkak, perang dengan koalisi negara Islam hanya akan membuat kondisi keuangan Rusia melemah. Selama ini, ekspor Rusia menuju negara-negara koalisi Arab Saudi pada 2014 saja mencapai \$28 miliar atau setara 8,4% dari total ekspor sebesar \$331 miliar.

Angka ini belum termasuk ekspor industri

militer. Pada eksibisi “*International Aviation and Space Show MAKS-2015*” yang digelar di Moskow tahun 2015 lalu, Putin mengklaim dirinya berhasil mendapat kontrak jangka panjang dengan lebih dari 60 negara untuk kelengkapan pertahanan. Kontrak jangka panjang itu bernilai lebih dari \$50 miliar. Hampir 30% pemesan itu adalah negara-negara Islam koalisi Arab Saudi seperti Mesir, Al Jazair, Qatar, Pakistan, Tunisia, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan data *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, di tahun 2014. Selain ke negara-negara Timur Tengah, alutsista militer Rusia terjual ke India (40%), Vietnam (10%), dan Cina (5%). Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, pada Juni 2015 mendatangi Putin dan mengikat kerja sama militer senilai \$10 miliar untuk 5 tahun ke depan. Saudi pun merencanakan kerja sama nuklir dengan Rusia senilai \$30 sampai \$40 miliar.

Kremlin tentunya tidak ingin dana besar ini hilang. Industri pertahanan Rusia menaungi lebih dari 2,5 juta pekerja serta mencakup 20% dari semua pekerjaan manufaktur. Terlalu fokus di Suriah hanya akan membuat keuangan dalam negeri jadi kacau. Oleh karenanya, masuk akal jika “iklan” Rusia di Suriah diakhiri di tahun 2016. Selama hampir tujuh bulan, Sang Beruang sudah cukup menunjukkan ototnya ke hadapan dunia sebagai negara digdaya sekaligus mempromosikan dagangan militernya. Meski demikian, pariwisata itu dibayar cukup mahal dengan kematian 1.984 orang.

Kesimpulan

Dahulu Suriah merupakan salah satu negara yang cukup stabil di kawasan Timur Tengah. Kestabilan ini bukan dari berjalannya demokrasi yang baik di negara tersebut, melainkan dari adanya rezim otoriter dinasti Al Assad, mulai dari ayahnya Hafiz yang dilanjutkan dengan anaknya Bashar. Kestabilan ini terganggu saat adanya revolusi Arab/ Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Rakyat menginginkan kebebasan, penegakkan HAM, demokrasi dan lain sebagainya. Revolusi ini dimulai di negara Tunisia, lalu ke Mesir dan ke negara-negara Arab lainnya, termasuk negara Suriah.

Revolusi di Suriah menginginkan agar rezim Bashar yang sudah lama berkuasa di Suriah dengan partai Ba'aath nya digulingkan. Mereka menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sayangnya Bashar Al Asaad sebagai Presiden Suriah tidak setuju atas kemauan rakyat tersebut. Sehingga pecahlah konflik antara rezim pemerintah yang menginginkan dipertahankannya Bashar Al Assad dan pihak oposisi yang menginginkan agar dia digulingkan dari roda pemerintahan.

Konflik ini berlangsung cukup lama dan dramatis. Banyak korban berjatuhan baik dari pihak sipil maupun militer. Rusia sebagai negara adidaya tidak tinggal diam melihat sekutunya dizalimi. Apalagi hubungan antara Rusia dengan Suriah sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak Perang Dingin berlangsung.

Rusia dengan kekuatan perangnya, mengirim militernya ke negara Suriah untuk melawan kelompok oposisi. Tindakan ini tentu saja tidak gratis. Rusia sengaja melakukan ini untuk kepentingan nasionalnya, yaitu untuk memamerkan kekuatan persenjataannya dan meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara Suriah.

Saat Rusia mengintervensi konflik Suriah, Amerika pun melakukan hal yang sama. Dia mengirim bantuan persenjataan kepada pihak oposisi agar bisa melawan pemerintahan Bashar. Begitu pula negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi beserta sekutunya. Sehingga konflik di negara Suriah hingga akhir tahun 2016 semakin parah dan tidak kunjung usai.

Apabila melihat tindakan Rusia mengintervensi konflik Suriah tahun 2011-2016 ini, maka akan menimbulkan dua dampak:

- Dampak 1: Konflik bersenjata antara Rusia dan AS

Intervensi Rusia di Suriah akan mendapat respon dari Amerika yaitu berbentuk demonstrasi kekuatan militer. Pada saat itu Rusia menunjukkan peningkatan intensitas militernya di Suriah. Rusia telah merencanakan unjuk kekuatan di negara Suriah sejak 2011, sehingga intervensi yang diluncurkan oleh AS, bahwa cepat atau lambat logika konfrontasi akan

memaksa Rusia merespons dengan kekuatan.

Potensi bentrok antara kedua kekuatan besar bukan berarti bencana nuklir global. Ia mungkin lebih berbentuk perang proksi/ diwakilkan tanpa ada deklarasi perang yang resmi. Di saat yang bersamaan, kita tidak dapat memungkiri bahwa senjata nuklir bisa saja digunakan di perang proksi ini. Para pengamat memperingatkan bahwa militer kedua negara memperbolehkan diri mereka untuk menggunakan senjata nuklir taktis.

- Dampak 2: Tragedi bagi Suriah

Para pengamat mengatakan bahwa Amerika menyerang tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Rusia, dan tidak memperhitungkan bagaimana serangan itu dapat mempengaruhi situasi di Suriah dan hubungan Rusia-AS di masa depan.

Setelah mengubah pendekatannya terhadap Bashar hanya dalam waktu singkat, Amerika sekali lagi akan berupaya membuatnya turun dari jabatannya. Namun Rusia tidak akan menyerahkan aliansinya itu dan akan meningkatkan kehadiran militernya di Suriah. Sebaliknya, Amerika juga tidak akan mundur. Sehingga Suriah menjadi medan pertempuran antara dua negara adikuasa. Negara ini akan hancur akibat perang sipil ditambah dengan perang antar negara adikuasa. Untuk memulihkannya mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Daftar Pustaka

- ABM, Agastya, *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*, Ircisod, Jogjakarta, 2013
- Sihbudi, Riza dkk, *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Ashari, Khasan, *Kamus Hubungan Internasional*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2015
- Kuncahyono, *Musim Semi Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Kompas, Jakarta, 2013
- Masoed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Carlsnaes, Walter dkk, *Handbook Hubungan*

- Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Internet
- <http://www.muslimedianews.com/2014/03/sekilas-mengenal-negara-suriah-syria.html?m=1>
- http://www.academia.edu/3812208/Paper_Fenomena_Arab_Spring
- <http://www.dakwatuna.com/2013/06/08/34716/revolusi-suriah-tragedi-berkepanjangan-menuntut-kebebasan/#axzz4mfWXXh18>
- <https://hizbut-tahrir.or.id/2016/04/09/perang-suriah-ruang-pameran-untuk-penjualan-persenjataan-rusia/>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8656/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- <http://wartaekonomi.co.id/read125625/rusia-sebut-langkah-as-tingkatkan-persenjataan-pemberontak-suriah-sebagai-tindakan-permusuhan.html>
- <http://mirajnews.com/2015/09/langkah-rusia-di-suriah-buat-panik-obama-dan-netanyahu.html/85522>
- <https://tirto.id/rusia-yang-habis-habisan-demi-suriah-b92q>